

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA

*Maria Marcelina Kambuna Kalalo<sup>1</sup>*  
*Marthen Kimbal<sup>2</sup>*  
*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### Abstrak

Salah satu terminal angkutan umum di Desa Tatele yang terabaikan dengan akses jalan rusak, terminal tersebut sudah selesai dibangun tetapi tidak ada aktivitas angkutan orang maupun barang, hal ini menjadi suatu pembangunan yang sia-sia. Masalah awalnya yaitu perencanaan pembangunan yang kurang matang dan lokasi terminal yang tidak strategis, sehingga diperlukan kebijakan dari dinas terkait agar terminal sebagai pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan terminal Tatele, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap para pelaksana dalam program ini mempunyai keinginan untuk melaksanakan program. Meskipun belum mendapat dukungan secara khusus dari Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Hal ini menandakan jika adanya dukungan yang kuat dari semua pihak dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal, pasti pelaksanaan kebijakan bisa dijalankan. Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembagian tugas sudah tersusun dengan baik. Didalam pelaksanaan sudah mengacu pada SOP yang ada. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparat di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasi dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pembangunan, Terminal.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## **Pendahuluan**

Kabupaten Minahasa Utara terbagi atas 10 kecamatan, 125 desa dan 6 kelurahan. Pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan aktivitas perekonomian ini tidak lepas dari sarana dan prasarana penghubung daratan dan lautan. Minahasa Utara memiliki posisi yang strategis karena berbatasan secara langsung dengan Kota Manado dan Kota Bitung. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan perkembangan wilayah Kabupaten Minahasa Utara tersebut maka kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi angkutan juga semakin meningkat. Hal tersebut mendasari pemerintah untuk lebih meningkatkan sektor transportasi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara yaitu terminal Airmadidi, terminal Kauditan, terminal Likupang, dan khususnya terminal Tatelu. Jika kita berkunjung ke Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di desa Tatelu kita akan melihat sebuah terminal angkutan umum yang terabaikan dengan akses jalan menuju terminal yang rusak. Begitulah keadaan terminal sekarang ini, ada terminal tetapi tidak adanya aktivitas angkutan orang maupun barang. Masalah awalnya yaitu perencanaan pembangunan yang kurang matang dan lokasi terminal yang tidak strategis, sehingga diperlukan kebijakan dari dinas terkait agar terminal sebagai pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang serius, karena terminal yang telah dibangun dan dirancang sedemikian rupa namun dalam pengoperasian fungsi, dan keberadaannya belum dirasakan secara utuh. Terminal Tatelu diresmikan pada awal Tahun 2015, setelah diresmikan

dan beroperasi nyatanya terminal ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Bahkan, saat ini terminal sudah kosong dan ditinggalkan oleh angkutan umum.

Persoalan letak yang strategis, akses jalan yang bagus dan sarana prasarana di terminal harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah disamping pembangunan fisik terminal tentunya. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud berupa jalur-jalur yang sudah disiapkan bagi angkutan umum yang selama ini mempergunakan terminal sebagai tempat naik maupun turunnya penumpang, toilet, air bersih, pos jaga, halte tempat duduk dan juga fasilitas lagi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga terlihat rapih. Tapi dalam kenyataannya fasilitas yang ada di terminal masih belum lengkap karena belum tersedianya rambu lalu lintas disekitar terminal dan tidak tersedianya pos jaga yang memantau keadaan terminal. Dengan keadaan tersebut, apakah dipengaruhi oleh kurang menunjangnya fasilitas pelayanan publik seperti terminal yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai terminal perpindahan moda tentunya harus memiliki pelayanan yang berkualitas karena terminal merupakan salah satu pelayanan public yang penting dalam menunjang aktivitas transportasi terutama transportasi darat yaitu mikro dan bus. Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi mengenai sejauh mana infrastruktur yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para

pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan (Indiahono, 2009:143). Menurut Friedrich (dalam Wahab 2008:3) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Carl J. Frederick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimana kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya di kerjakan daripada apa yang di usulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005:2), kebijakan publik adalah “segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (what government did,

why they do it, and what differences it makes)”. Dalam pemahaman bahwa “keputusan” termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau memutuskan untuk “tidak mengurus” suatu isu, maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008:185) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan “segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah”.

Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul Teori dan Proses Kebijakan Publik menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut: “Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101). Berdadine R.Wijaya dan Susilo Supardo (2006:81), mengatakan bahwa implementasi adalah proses pengtransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislative atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang substantive. Hinggis, mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai strategi. Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi yang mengemukakan bahwa : “Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih tidak kurang.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut". (Dwijowijoto, 2006:158). Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

Ada beberapa variabel penting yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Beberapa pakar mengklasifikasikan variabel-variabel penting dalam implementasi kebijakan. Pandangan Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy*, seperti yang dikutip oleh Widodo (2011:96) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: "four critical factors or variables in implementing public police: communication, resources, dispositions or attitude, and bureaucratic structure", (empat faktor atau variabel kritis dalam melaksanakan kebijakan publik : komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi). Berdasarkan pandangan Edwards III (dalam Widodo 2011:96) keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu : Pertama komunikasi kebijakan, berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi,

antara lain dimensi penyampaian informasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*). Dimensi *transmission* yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Dimensi kejelasan (*clarity*) berarti menghendaki agar kebijakan yang di transmisikan kepada para pelaksana, sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas, sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan dari kebijakan. Dimensi Konsistensi (*consistency*) yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.

Kedua yaitu sumber daya, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dimensi Sumber Daya meliputi manusia (*staff*), peralatan (*facilities*), dan Informasi dan Kewenangan (*information and authority*). Dimensi sumber daya manusia berarti, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (*aparatur*) yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Dimensi sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan. Dimensi Informasi dan Kewenangan yaitu informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan sangat diperlukan terutama untuk menjamin dan

meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga yaitu disposisi, disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada pelaksana. Disposisi terdiri dari pengangkatan birokrasi (*staffing the bureaucracy*) dan insentif (*incentives*). Dimensi pengangkatan birokrasi merupakan pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Dimensi insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan pemberian penghargaan, baik uang atau lainnya.

Keempat yaitu struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek penting dari setiap organisasi adalah adanya standar operating procedures (SOP). SOP akan menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Tidak jelasnya SOP diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dimensi fragmentation merupakan organisasi pelaksana yang terpecah-pecah atau tersebar akan menjadi distorsi dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin fragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III dalam Widodo, 2011:96-110.

Edwards melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edwards menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu :

- 1) Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
- 2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication, resources, disposition, dan bureaucratic structure (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

## Konsep Terminal

Terminal merupakan sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sesuai dengan fungsinya sebagai tempat pemberhentian sementara (*transit*) maka di dalam terminal akan terjadi perpindahan penumpang atau barang dari satu jenis angkutan ke jenis moda

angkutan yang lainnya, sehingga tuntutan efisiensi dari suatu perjalanan bisa tercapai. Berdasarkan tuntutan tersebut maka suatu terminal harus mampu menampung, menata dan mengendalikan serta melayani semua kegiatan yang terjadi akibat adanya perpindahan kendaraan, penumpang maupun barang sehingga semua kegiatan yang ada pada terminal dapat berjalan lancar, tertib, teratur, aman dan nyaman. Terminal adalah prasarana untuk angkutan jalan raya guna untuk mengatur kedatangan pemberangkatan pangkalannya kendaraan umum serta memuat atau menurunkan penumpang atau barang (Morlok, 2005:24).

Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat Bina Sistem Prasarana (Departemen Perhubungan, 1996) fungsi terminal pada dasarnya dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal yaitu :

#### 1) Penumpang

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi (peralatan, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dari kendaraan pribadi dan lain-lain).

#### 2) Pemerintah

Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan, sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum.

#### 3) Operator Angkutan Umum

Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, menyediakan fasilitas istirahat

dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic (Wirata Sujarweni, 2014:6).

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara, dan peneliti menggunakan teori yang dapat dirincikan dalam hal ini proses implementasi dilihat dari 4 aspek dalam model yang di tawarkan oleh Edward III yaitu :

- 1) Komunikasi (communication)
- 2) Sumber Daya (resources)
- 3) Sikap (disposition)
- 4) Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)

Dalam rangka pencarian data, terlebih dahulu harus ditentukan informan dan subyek penelitiannya. Informan dalam penelitian ini adalah data atau seorang yang memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi (1 Orang)
- 2) Kasie Sarana Prasarana (1 Orang)

- 3) Petugas LLAJ Terminal Tatelu (1 Orang)
- 4) Supir Angkutan Umum (1 Orang)
- 5) Masyarakat Sekitar Terminal (1 Orang)

## Hasil Penelitian

Pelaksanaan wawancara langsung dengan informan yang telah penulis lakukan ini dilakukan dalam waktu lebih dari 1 bulan dengan melibatkan informan sebagaimana telah direncanakan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi, Kasie Sarana Prasarana, Petugas LLAJ, Masyarakat Sekitar Terminal, dan Supir Angkutan Umum dengan fokus penelitian pada masalah implementasi kebijakan pembangunan terminal tatelu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara, masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan permasalahannya belum juga selesai, sementara Pembahasan Implementasi ini yaitu (Mengidentifikasi Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan dilihat dari empat variabel yang di kemukakan Edward III).

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Keterampilan dalam berkomunikasi menjadi sangat penting untuk menjamin suatu pesan yang disampaikan agar tidak terjadinya distorsi informasi yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan. Adapun komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu koordinasi yang dilakukan pelaksana kebijakan pembangunan Terminal Tatelu pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara dengan pihak terkait yang sesuai tujuan dan sasaran serta melakukan sosialisasi atau komunikasi yang konsisten untuk memperjelas kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan kebijakan sangat memerlukan komunikasi yang baik dari para pelaksana karena dari komunikasi yang dilakukan akan memberikan pengertian dan pemahaman kepada sasaran atau target kebijakan agar memberikan dampak yang positif terhadap pelaksana kebijakan. Tentunya untuk menjadikan kebijakan berjalan dengan baik, perlunya dilakukan sosialisasi yang jelas dan konsisten kepada sasaran atau target kebijakan. Untuk itu komunikasi kebijakan harus dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan memberikan pemahaman kepada sasaran atau target kebijakan. Terkait dengan implementasi kebijakan pembangunan Terminal Tatelu yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara sebagai fokus penelitian, komunikasi antar pimpinan kepada pegawai memang belum maksimal, kurangnya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini, dan juga kurangnya dukungan dari pihak kepolisian membuat pelaksanaan kebijakan ini jadi terhambat.

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumberdaya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas, sumberdaya informasi dan kewenangan.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan mengenai sumberdaya kebijakan yang terkait dengan sumberdaya dalam hal kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan kebijakan dan ketersediaan sumberdaya anggaran serta sarana dan prasarana disimpulkan bahwa kemampuan pelaksana dalam mengkomunikasikan kebijakan menunjukkan hasil yang belum maksimal. Dan sumberdaya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan terminal belum di dukung secara penuh dari Pemerintah. Dapat diketahui bahwa koordinasi yang baik antar pihak terkait diharapkan dapat efektif dan efisien untuk memfungsikan kembali Terminal Tatelu. Meskipun begitu, dinas perhubungan sendiri berharap adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, supir dan kepolisian.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan di jalankan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Sikap badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan, dukungan dari luar atau kelompok sasaran, maupun perorangan sangat menentukan. Tanpa dukungan tersebut sulit untuk diharapkan dalam terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan kebijakan ini dukungan penuh dari pemerintah kabupaten masih kurang dan belum maksimal. Akibatnya, pelaksanaan pembangunan Terminal Tatelu belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Terminal Tatelu pada penelitian ini disimpulkan belum maksimal, karena belum adanya dukungan penuh dari semua pihak. Sehingga pelaksanaan kebijakan sangat sulit dijalankan. Pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik jika sepenuhnya di dukung oleh semua pihak, terlebih khusus anggaran yang diperlukan untuk membantu proses pelaksanaan kebijakan

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas

dan kewenangan yang diembannya. Struktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif. Menurut Edward III dalam Widodo (2011:96-110), kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah di gariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dilakukan agar aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih

aparatur di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasi dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda, dan fungsi birokrasi juga berada dalam lingkungan yang luas dan kompleks. Berdasarkan uraian diatas sangat jelas, bahwa struktur birokrasi pada Dinas Perhubungan Minahasa Utara bertugas sesuai dengan ketentuannya masing-masing secara profesional.

## Kesimpulan

1. Komunikasi yang dilakukan secara intern sudah cukup baik, sedangkan komunikasi yang dilakukan secara ekstern masih kurang intens. Dalam pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara dalam mengkomunikasikan kebijakan tentang pembangunan Terminal Tatelu terkait dengan pembangunan terminal, secara internal dinas tersebut sudah berupaya melakukan koordinasi pada semua pihak yang terlibat dan sudah mengupayakan agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan, walaupun masih diperhambat dengan masalah anggaran dan kurangnya dukungan dari beberapa pihak yang bersangkutan.
2. Sumberdaya yang pertama dilihat dari aspek sumberdaya manusia/tenaga kerja belum cukup baik dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua fasilitas penunjang yang ada di terminal memang perlu diperbaiki terutama sarana prasarana umum yang sudah tidak terawat, dan perlu adanya pos jaga dan rambu-rambu lalu lintas disekitar terminal.

- Sedangkan sumberdaya dana/ finansial untuk pelaksanaan kebijakan pembangunan diperoleh dari pemerintah (melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara), dana tersebut tidak dimasukkan dalam APBD tahun ini. Meskipun sudah di anggarkan untuk pembangunan, namun terhambat karena adanya pengurangan dana dari pusat.
3. Sikap para pelaksana dalam program ini mempunyai keinginan untuk melaksanakan program. Meskipun belum mendapat dukungan secara khusus dari Pemerintah Daerah, yang mengakibatkan proses pembangunan tidak dapat dilakukan. Hal ini menandakan jika adanya dukungan yang kuat dari semua pihak dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal, pasti pelaksanaan kebijakan bisa dijalankan.
  4. Struktur birokrasi yang menggambarkan posisi dan pembangian tugas sudah tersusun dengan baik. Didalam pelaksanaan sudah mengacu pada SOP yang ada. Struktur birokrasi yang baik akan memberikan dorongan kepada keberhasilan pelaksanaan pembangunan, walaupun dalam pelaksanaan pembangunan terminal ini mengalami adanya kendala. Tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari sebuah birokrasi terlebih aparat di Dinas Perhubungan Minahasa Utara harus sesuai Struktur Organisasi dan kewenangannya dalam mengerjakan suatu pekerjaan guna terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien.

## Saran

1. Dinas Perhubungan perlu mengadakan sosialisasi dengan sasaran atau target kebijakan, dan harus lebih meningkatkan koordinasi antara pihak yang terkait agar pengevaluasian terhadap program-program yang telah dijalankan dapat berjalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Untuk sumberdaya dana atau finansial harus ditambahkan mengingat pembiayaan yang ada masih kurang untuk memperbaiki fasilitas penunjang yang ada di Terminal Tatelu. Serta menganggarkan penerangan lampu dan rambu lalu lintas di sekitar terminal.
3. Perlu adanya dukungan yang kuat dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar Terminal Tatelu ini kembali di fungsikan.
4. Meningkatkan SDM, baik dalam kualitas maupun kuantitas, agar mampu memberi pelayanan yang lebih baik. Pembinaan terhadap pegawai harus lebih di tingkatkan agar rasa tanggung jawab terhadap tugas lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Sakti Adji, 2011. Transportasi Dan Pengembangan Wilayah. Yogyakarta. Penerbit : Graha Ilmu.
- Agus, ErwanPurwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta.

- Budi, W. 2012. Kebijakan Publik (Teori & Studi Kasus). Jakarta : Caps Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 2012. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- George. E. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis, Yogyakarta: Gafa Media.
- Moleong, L, J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morlok, Edward K. 2005. Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi, Penerbit Erlangga.
- Nugroho, R. 2008. Public Policy. Jakarta: Elekmedia Komputindo.
- Sinta Baskoro, 2010. Pemanfaatan Terminal Angkutan Umum Regional Terkait Dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah, Universitas Brawijaya.
- Solichin Abdul Wahab, 1997. Analisis Kebijakan. Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, W, V. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Wahab, Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widodo. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayu Media.
- Winarno, B. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Winarno, B. 2014. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. Cetakan Kedua, CAPS, Yogyakarta.
- Sumber Lain :
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti Undang-undang Nomor 14 tahun 1992.
- Sumber Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Utara
- Sumber <https://bencanasulut.wordpress.com>
- Sumber [www.minutkab.go.id](http://www.minutkab.go.id)